

LEGAL MEMORANDUM

KEPASTIAN HUKUM PENGATURAN TATA CARA PENGISIAN BLANKO AKTA PPAT DI INDONESIA

Rachel Michelle A

(1187049)

ABSTRAK

Penyusunan Legal Memorandum ini merumuskan permasalahan pokok dengan latar belakang bahwa Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah untuk menjamin kepastian hukum bagi pemilik tanah yang diadakan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah sehingga banyak terjadinya perbedaan pemahaman mengenai pembuatan akta PPAT dan menimbulkan permasalahan hukum terutama dalam bidang agraria/pertanahan di Indonesia.

Penulisan tugas akhir ini disusun dalam bentuk legal memorandum dengan sistematika sebagai berikut: latar belakang masalah, kasus posisi, pemeriksaan dokumen terkait, dilengkapi dengan landasan teori, pemberian legal opinion, dan ditutup dengan kesimpulan dan saran.

Hasil penulisan ini dapat disimpulkan sebagai berikut: Lahirnya Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 memberikan kepastian mengenai tata cara pengisian blanko akta dan memberikan kepastian hukum kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pejabat yang diberi kewenangan untuk membuat akta. Penggunaan blanko akta yang telah disiapkan oleh Badan Pertanahan Nasional banyak menggunakan coretan sehingga proses pembuatan akta dinilai kurang efektif.

Kata Kunci : Kepastian Hukum, Blanko Akta PPAT, Pendaftaran Tanah

LEGAL MEMORANDUM

LEGAL SECURITY PROCEDURE FOR FILLING PPAT BLANK CERTIFICATE IN INDONESIA

Rachel Michelle A

(1187049)

ABSTRACT

The Preparation of Legal Memorandum formulates main problems with a background that the Land Registry is a series of activities continuously done by government to ensure law certainty for landowners. This is conducted according to the provisions stipulated by government regulations, which caused many different perceptions about the making of PPAT deed and also raises law problems, specifically in the field of agrarian / land in Indonesia.

This thesis is arranged in the form of legal memorandum with the following systematics: the background of the problem, the position case, the checking of related documents, then continued with the theoretical basis, legal opinions, and closed by the conclusions and suggestions.

The results of this paper can be summarized as follows: The Birth of the National Land Agency of the Republic of Indonesia (BPNRI) Regulation, Number 8 Year 2012 gives law certainty to the Land Deed Official as the rightful one to concoct the deed. The use of blank deeds prepared by the National Land Agency use a lot of drafts, which should be known by the parties by signing every single each and this makes the making of the deed is considered to be less effective.

Keywords: Law Certainty, PPAT Blank deed, Land Registration

DAFTAR ISI

Hlm.

Abstrak i

Kata Pengantar iii

DAFTAR ISI vi

BAB I : Kepastian Hukum Pengaturan Penyusunan Blanko Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah

di Indonesia 1

A. Latar Belakang 1

B. Kasus Posisi 2

C. Identifikasi Masalah 8

D. Tujuan Penelitian 8

E. Manfaat Penulisan 9

F. Sistematika Penulisan 10

BAB II : Dokumen Terkait 12

A. Contoh akta yang ditolak oleh Badan Pertanahan Nasional 12

B. Contoh akta yang diterima oleh Badan Pertanahan Nasional 19

BAB III : Landasan Teori 29

A. Pengertian Pendaftaran Tanah 29

B. Pengertian Blanko Akta 35

C. Pengertian Pejabat Pembuat Akta Tanah	36
D. Pengertian Hukum Agraria	37
 BAB IV : Legal Opinion	40
A. Bagaimanakah penerapan hukum yang berlaku di Indonesia terhadap pembuatan-pembuatan akta-akta PPAT, dalam proses pendaftaran hak di BPN ?	40
B. Bagaimanakah aturan dalam Perkaban Nomor 8 Tahun 2012 terhadap akta-akta yang dibuat oleh PPAT ?	44
 BAB V : Kesimpulan dan Saran	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	53
 DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN	57